

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku:

- Aartje Tehupeiory. (2012). *pentingnya pendaftaran tanah di indonesia*.
- Adrian Sutedi. (2012). *Sertifikat Hak Atas Tanah*.
- Arie Sukanti Hutagalung. (2012). *Hukum pertanahan di Belanda dan Indonesia*.
- Aziz, A. saiful. (2019). *Hukum Nasional*.
- bambang Sunggono. (2007). *Metedeologi Penelitian Hukum*.
- Bima-ntb, K., & Fahrurrahman, A. I. (2020). *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pendaftaran Tanah-Tanah Hak Milik Adat (Study Kasus Di Desa O ' O dan Desa Dori Dunga Kecamatan Donggo. 6(2)*.
- Boedi Harsono. (2007). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*.
- Dr. Urip Santoso, M.A., S.H., M. H. (2017). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*.
- Eddy Ruchiyat. (1989). *Sistem Pendaftaran Tanah*.
- Efendi Perangin. (2020). *Praktek Jual Beli Tanah*.
- effendi. (2017). *Konsep Welfare State Di Indonesia*.ss
- Florianus Sangsun. (2007). *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*.
- Hardian, Y. D. (2020). *Hukum Pertanahan di Indonesia*.
- Hartando, A. (2009). *Kebijakan Penataan Ruang Berbasis Hak Milik*.
- Harun Al Rasyid. (2018). *Tentang Jual Beli Tanah*.

- Hukum, M. K. (2007). Fungsi sertifikat hak atas tanah dalam menjamin kepastian hukum. *Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Menjamin Kepastian Hukum*, 5(0854), 65–75.
- James Julianto Irawan. (2014). *Surat Berharga : Suatu Tinjauan Yuridis Dan Praktis*.
- Kaelan. (2010). *Pendidikan Pancasila*.
- Kartini Muljadi. (2008). *Hak-hak atas Tanah*.
- Mertokusumo, S. (n.d.). *Hukum Agraria Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. 2017.
- Notonegoro, R. S. (2009). *Hukum Pertanahan Indonesia*.
- Nurhikmah. (n.d.). *Dinamika Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Pandangan Hidup Bangsa*.
- Peter Mahmud Marzuki. (2007). *Penelitian Hukum*.
- Prof. Dr. Kaelan, M. A. (2012). *Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Nasional*.
- Pujianto, A. A., Degeng, I. N. S., & Sugito, S. (2020). Pengaruh penggunaan aplikasi Plantnet dan gaya belajar terhadap hasil belajar. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 7(1), 12–22. <https://doi.org/10.21831/jitp.v7i1.31365>
- Rowland Bismark Fernando. (2013). *Pancasila Sebagai Etika Politik*.
- Saleh, K. W. (2014). *Pokok-Pokok Hukum Agraria*.
- Sari, A, W. (2018). *Kajian Hukum Tentang Keterlambatan Pendaftaran Tanah Dan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Pertanahan. Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- SARI, N. (2021). *KONSEP HAK MENGUASAI NEGARA TERHADAP TANAH DALAM HUKUM TANAH (UUPA) DAN KONSTITUSI*.
- Satrio, A. (2018). *UU Pokok Agraria dan Implementasinya di Indonesia*.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*.

- Soekanto, S. (2020). *Penelitian hukum normatif*.
- Soemadipradja, R. A. (2013). *Hukum pertanahan indonesia*.
- Soerodikoro, S. (2016). *Pendaftaran Tanah di Indonesia*.
- Soerodikoro, S. (2019). *Hukum Pertanahan di Indonesia*.
- Sudarmodjo. (2018). *Hukum Pertanahan Indonesia*.
- Sudikno Mertokusumo. (2011). *Pembaruan Hukum Agraria Nasional*.
- urip santoso. (2010a). *Eksisten Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional*.
- urip santoso. (2010b). *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*.
- Wibowo, A. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Akibat Keterlambatan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan. Jurnal Hukum & Pembangunan*.

B. Sumber Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah